

## MENGGAPAI TENAGA TERAMPIL MENGELOLA DANA DESA DI SMK PGRI 2 CIBINONG BOGOR

**Edy Sudaryanto**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor

Email: edysudaryanto1159@gmail.com

### KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 15 November 2019

Direvisi: 20 November 2019

Disetujui: 10 Desember 2019

### Klasifikasi JEL

I20 M41

**Keywords:** *SMK, Village Funds, Skilled HR*

**Kata kunci:** *SMK, Dana Desa, SDM Terampil*

### ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze opportunities, challenges, constraints and efforts of vocational high school or Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) to create graduates especially accounting programs that are able to manage village funds. The object of the study are accounting program students of SMK PGRI 2 Cibinong. Data used in this study are primary data and secondary data. Data is collected using interviews, observation, and documentation. Data analysis methods use data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of this study show that the SMK PGRI 2 Cibinong Bogor aware of the opportunities for SMK graduates of the accounting program to fill the scarcity of skilled human resources to manage village funds. But teachers have less experience in the practice of village fund accounting so that they do not have confidence in teaching. Other constraints are less discussion of government accounting in the accounting syllabus and the absence of a standard handbook/module for teachers to teach accounting subjects.*

### ABSTRAK

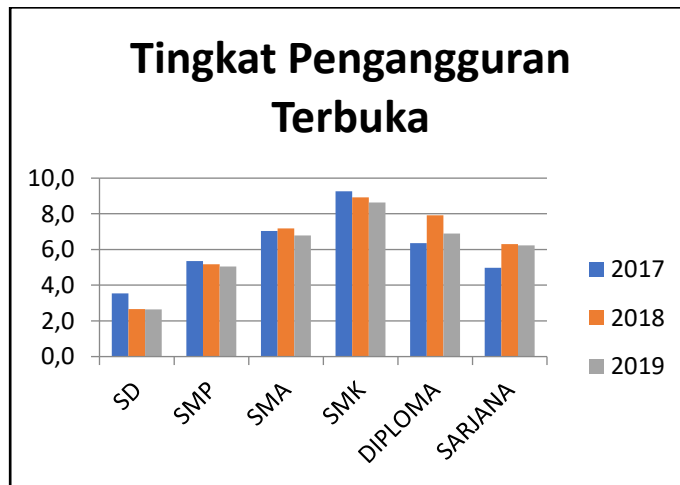
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang, tantangan, kendala dan upaya SMK untuk menciptakan lulusan khususnya program akuntansi yang mampu mengelola dana desa. Objek penelitian yang diteliti yaitu siswa siswi SMK PGRI 2 Cibinong program akuntansi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa SMK PGRI 2 Cibinong Bogor telah menyadari tentang peluang bagi lulusan SMK program akuntansi untuk mengisi kelangkaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola dana desa, namun masih minimnya pemahaman guru mata pelajaran akuntansi, mengenai praktik akuntansi dana desa sehingga guru belum berani mengajarkan didepan kelas. Kendala lain berupa silabus mata pelajaran akuntansi sangat minim membahas akuntansi di sektor pemerintahan khususnya dana desa dan tidak adanya buku pegangan/modul yang baku bagi guru untuk mengajarkan mata pelajaran akuntansi.

\*Keterangan: Artikel ini pernah dipresentasikan di Parade Riset Akuntansi (PRA) 4, 30-31 Oktober 2019, dan telah mengalami perombakan substansial.

**PENDAHULUAN**

Pidato Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2019 saat penyampaian nota keuangan tahun 2018 dan RAPBN tahun 2020 dihadapan sidang MPR RI, menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM telah disiapkan yang bertujuan untuk membangun generasi muda yang berkarakter, bertalenta, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Maka dari itu, anggaran untuk pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 (Sembiring and Asmara, 2019). Adanya peningkatan anggaran pendidikan tersebut, membuat pemerintah merancang pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Februari 2017-Februari 2019**

Menurut Badan pusat statistik (2018) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dilihat dari Gambar 1, dapat diketahui bahwa TPT menurut tingkat pendidikan di Indonesia selama tahun 2017 hingga 2019 yang memiliki persentase tertinggi adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu secara berturut-turut sebesar 9,27; 8,92; 8,63. Menurut Ridwan Kamil (2019), akibat tingginya TPT lulusan SMK, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pendidikannya pada tahun 2019, untuk

diterapkan pada tahun 2020, dimana SMK harus sesuai dengan arah ekonomi baru yang hampir semua berbasis digitalisasi.

Dalam kaitan menjawab tantangan di bidang tenaga kerja, pemerintah terus mendorong penyiapan tenaga produktif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan atau vokasi, seperti pendidikan di SMK. Keseriusan pemerintah mendorong pendidikan vokasi yang dicirikan dengan pendidikan yang *link and match* dengan dunia industri, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9

Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM. Harapan pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, perlunya sinergi bagi para pemangku kepentingan seperti Kementerian atau LPNK terkait, serta para Kepala Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghasilkan tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki daya saing. Melalui sinergi antar para pemangku kepentingan ini, diharapkan penguatan pendidikan kejuruan dapat mewujudkan nawacita yang bertujuan daya saing bangsa.

Tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki daya saing seharusnya dapat membantu pemerintah dalam mengelola dana desa sehingga pengangguran lulusan SMK dapat berkurang. Menurut Sofiyanto et al., (2017) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah merancang penganggaran dana desa melalui APBN yang dianggarkan sejak pertama kali digulirkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Setiap tahun, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu meningkat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Fitritamami et al., 2018). Berikut disajikan rincian dana desa tahun 2015-2019:

**Tabel 1. Rincian Dana Desa**

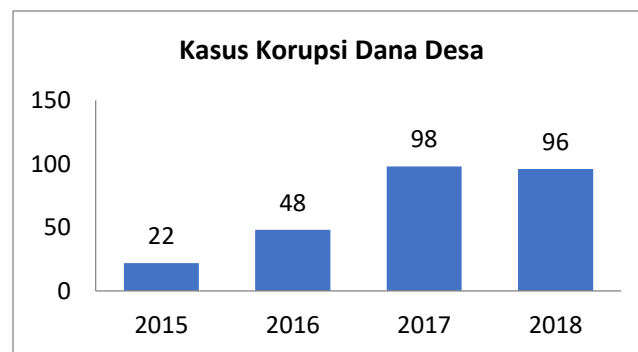
No	Tahun	Dana Desa (Triliun Rupiah )	Rata-rata per Desa (Jutaan Rupiah)	Kenaikan Dana Desa per tahun (%)
1.	2015	20,67	280	-
2.	2016	46,98	628	127,29
3.	2017	60	800	27,71
4.	2018	60	800	0
5.	2019	70	933	16,63
Total		257	3.408	

Sumber: Kompas.com diolah penulis, 2019

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 di mana besaran dananya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir, tetapi hanya tahun 2018 saja yang besarnya dananya tidak mengalami peningkatan. Tabel di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap desa sangat besar untuk menopang peningkatan perekonomian nasional. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat (Shuha, 2018).

Namun kenyataan di lapangan, dengan bertambahnya dana desa sepertinya tidak diimbangi dengan pengelolaan dana desa yang profesional oleh perangkat desa. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya korupsi dana desa oleh oknum aparat desa. Berikut disajikan data korupsi dana desa 2015-2018:



Sumber: cnnindonesia.com, 2019

**Gambar 2. Kasus Korupsi Dana Desa**

Berdasarkan Gambar 2, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat 252 kasus korupsi dana desa. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2017, yaitu 98 kasus. Kasus korupsi dana desa ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp107,7 miliar (Novelino, 2019)

Dengan lemahnya pengelolaan dana desa seperti yang disebutkan di atas dan banyaknya TPT lulusan SMK (termasuk lulusan program akuntansi), hal ini menjadi sangat ironis karena sebenarnya TPT lulusan SMK khususnya program akuntansi tersebut bisa dimanfaatkan atau bekerja untuk memperkuat dan memperbaiki pengelolaan dana desa. Lulusan SMK di bidang akuntansi sangat terbuka lebar untuk mendapatkan lapangan kerja di desa dengan mengelola dana desa, sehingga dapat mengeliminir penyalahgunaan dana seperti yang terjadi saat ini dan tidak harus berbondong-bondong berurbanisasi mencari pekerjaan ke kota.

Menurut Fitritamami *et al.* (2018) pengelolaan yang baik membutuhkan kompetensi yang mumpuni. Sayangnya, mayoritas dari penduduk desa hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar, sehingga kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Padahal pengelolaan keuangan seharusnya dilakukan oleh dua pihak aparatur desa dan masyarakat desa, sehingga dibutuhkannya pembinaan baik kepada aparatur maupun masyarakat desa. Sejalan dengan penelitian Fitritamami *et al.* (2018) dan Shuha (2018) menyatakan bahwa faktor

penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung, yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan alokasi dana desa karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa juga merupakan salah satu faktor penghambat (Putra and Pratiwi, 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peluang, tantangan, kendala serta upaya yang dihadapi oleh SMK khususnya pada program akuntansi untuk menciptakan lulusan yang mampu mengelola dana desa.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pendidikan SMK (Vokasi) Program Akuntansi**

Pendidikan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Salah satu jenis pendidikan formal yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yaitu SMK. SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat (Premono, 2010). Menurut pasal 15 UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15: "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu". Margunani dan Nila (2012) mengemukakan bahwa dalam membangun pendidikan dan menjawab tantangan zaman dan penyiapan tenaga kerja profesional yang ada disektor formal yaitu SMK. SMK menggunakan prinsip *link and match*.

Namun kenyataannya SMK masih belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan dunia kerja (Wibowo, 2016). Valid dan Taman (2012) menyatakan bahwa siswa lulusan SMK belum diakui secara penuh dan masih diragukan oleh pasar tenaga kerja karena adanya perbedaan yang nyata kompetensi di sekolah dan dunia industri. Adanya SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil masih perlu ditingkatkan.

### **Desa dan Dana Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fitritamami *et al.*, 2018). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa merupakan wilayah terpenting dalam menyukseskan pembangunan menuju kesejahteraan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Sofiyanto *et al.*,

2018). Tujuan dari pemberian dana desa menurut Putra dan Pratiwi (2013) yaitu: pertama untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, kedua untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, ketiga meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, keempat meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, kelima meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, keenam meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, ketujuh mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, kedelapan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Laporan Keuangan Dana Desa**

Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan peraturan perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tersebut dinyatakan azas pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Laporan keuangan terdiri atas: Laporan realisasi APBDes dan Catatan atas laporan keuangan dan Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Dalam bab III pasal 4 Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, terdapat 5 (lima) point prioritas penggunaan dana desa yaitu: pertama prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kedua prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, ketiga program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa, keempat pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kelima prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

#### **Pendamping Dana Desa**

Pendamping dana desa merupakan tenaga honorer yang direkrut oleh KemendesPDTT dan dibiayai dari DIPA Kemendes PDTT yang mempunyai tugas untuk memberikan pendampingan dari mulai perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir dana yang dikelola oleh desa.

Berdasarkan data Kemendes PDTT saat ini tercatat pendamping desa mencapai 34.000 orang, sedangkan jumlah desa di Indonesia mencapai 74.910 desa. Menurut Sekretaris Jenderal KementeriandesPDTT (Anwar Sanusi) tenaga pendamping masih kurang menurutnya idealnya satu desa satu pendamping desa, sehingga membutuhkan 74.910 orang. Problematika akan menambah pendamping desa ini adalah problematika anggaran (Julianto, 2017).

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan lokasi penelitian di SMK PGRI 2 Cibinong. Adapun objek penelitian yang akan

teliti yaitu siswa siswi SMK PGRI 2 Cibinong program akuntansi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pola pendidikan yang diajarkan di SMK bobot praktik lebih besar dari pada teori kalau dibuat perbandingan praktik tujuh puluh persen dan teori tiga puluh persen. Praktik yang diajar di SMK tentunya sesuai dengan program/jurusan yang ada sehingga misalnya program akuntansi tentunya praktik yang diajarkan kepada peserta didik adalah praktik akuntansi yang secara riil dilakukan oleh institusi baik di sektor publik (nirlaba) maupun di sektor privat (laba).

Namun bila dilihat dari kurikulum dan silabus SMK, khususnya program akuntansi yang dijadikan fokus penelitian, praktik yang diajarkan oleh guru/pendidik lebih banyak praktik akuntansi di sektor privat tapi tidak secara komprehensif mengupas praktik riil di lapangan dan bahkan minimnya bahan bacaan/buku sebagai pegangan guru untuk mengajar akuntansi. Sedang teori maupun normatif akuntansi di sektor publik (pemerintahan) belum pernah diajarkan oleh guru kepada peserta didik.

Dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang setiap tahun menambah anggaran dana desa tetapi pengelolaannya selalu mengalami masalah (kebocoran/korupsi), ini adalah peluang bagi lulusan SMK program akuntansi untuk mengisi kelangkaan sumber daya manusia yang terampil mengelola dana desa. Peluang ini sepertinya belum tersentuh oleh sekolah (SMK) untuk membentuk peserta didik agar diajarkan mengelola dana desa secara akuntabel, tentunya melalui mata pelajaran akuntansi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK PGRI 2 Cibinong Bogor, Ibu Dra.

Endang Susilowati, M.M. beliau menyadari tentang peluang tersebut tetapi masih minimnya pemahaman guru mata pelajaran akuntansi mengenai praktik akuntansi dana desa, sehingga guru belum berani mengajarkan di depan kelas. Hal ini menurut kepala sekolah menjadi tantangan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah khususnya pendidikan vokasi yang harus *link and match* dengan dunia industri, khususnya di program akuntansi. Caranya, dengan melakukan pelatihan para guru mata pelajaran akuntansi tentang akuntansi dana desa dengan mendatangkan pakar yang kompeten dan memberikan waktu yang cukup untuk mengajarkan praktik akuntansi khusus dana desa kepada peserta didik. Pernyataan ibu kepala sekolah tersebut diakui oleh Ketua Prodi Akuntansi, Bapak Andre. Beliau mengatakan kendala yang dihadapi selain pemahaman para guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi khususnya dana desa, juga masih kurang masalah silabus mata pelajaran akuntansi di sektor pemerintahan terkait dana desa. Tidak adanya buku pegangan/modul yang baku bagi guru untuk mengajarkan mata pelajaran akuntansi. Selain itu, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan oleh peserta didik kelas XI. Di satu sisi praktik mata pelajaran akuntansi baru diberikan di kelas XII. Seharusnya, di kelas harus sudah diajarkan praktik akuntansi dana desa agar ilmunya bisa bermanfaat bagi desa. Jika lulusan SMK memiliki bekal pendidikan yang mumpuni, maka pengelolaan dana desa bisa diberikan kepada para lulusan SMK. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pemerintah untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

Seiring dengan bertambahnya anggaran dana desa yang disiapkan pemerintah dalam APBN tentunya harapan pemerintah diikuti pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu penggunaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan desa yang merujuk dengan skala

prioritas program yang ditetapkan oleh KemendesPDTT.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sanja (sebagai tempat PKL murid Kelas XI) yang diwakili oleh Sekretaris Desa, yaitu Bapak Hadi. Beliau mengharapkan putera Desa Sanja terutama lulusan SMK program akuntansi ini bisa mengabdikan di desanya. Sampai saat ini belum ada satu pun putera/puteri Desa Sanja lulusan SMK program akuntansi yang bekerja di desanya. Beliau lebih senang yang menjalankan pekerjaan akuntansi dana desa ini adalah putera/puteri Desa Sanja yang lulus SMK program akuntansi dibanding dengan tenaga pendamping yang direkrut oleh Kemendes PDTT. Hal ini karena tenaga pendamping yang ada sering merangkap pekerjaan di tempat lain, sehingga pendampingan dengan desa dirasakan kurang intensif. Menurut Bapak Hadi yang menjadi kendala adalah untuk membayar honor/gaji bila merekrut tenaga dari lulusan SMK karena anggaran desa untuk belanja pegawai sangat minim. Saran beliau adalah menghapus tenaga pendamping dan diganti oleh putera/puteri desa lulusan SMK program akuntansi yang terampil dan mengalihkan pembayaran honor pendamping yang dibayarkan KemendesPDTT kepada tenaga lulusan SMK tersebut.

## PENUTUP

Menjawab tantangan di bidang SDM, pemerintah terus mendorong penyiapan tenaga produktif dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi seperti pendidikan SMK. Keseriusan pemerintah mendorong pendidikan vokasi tersebut yang dicirikan dengan pendidikan yang *link and match* dengan dunia industri. Dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah telah merancang penganggaran dana desa melalui APBN yang dianggarkan sejak pertama kali digulirkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya semakin meningkat. Bagi penyelenggara pendidikan SMK yang memiliki program akuntansi dengan besarnya dana

desa yang dikelola oleh desa tentunya menjadi tantangan dan sekaligus sebagai peluang untuk mengisi kelangkaan SDM yang terampil untuk mengelola dana desa melalui keahlian akuntansi. Dengan penyiapan lulusan SMK khususnya program akuntansi yang terampil setidaknya membantu pemerintah untuk memecahkan masalah pengangguran dan berbondong-bondongnya lulusan SMK berurbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan.

Belum *link and match* pendidikan SMK khususnya program akuntansi lebih disebabkan kesiapan para guru memahami akuntansi sektor publik/pemerintahan khususnya akuntansi dana desa selain itu masih kakunya sekolah untuk mematuhi secara normatif silabus mata pelajaran akuntansi sehingga guru sibuk mengajarkan teori dikelas tanpa memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah tentang dana desa yang membutuhkan pengelolaan yang akuntabel tentunya melalui mata pelajaran akuntansi dan minimnya bahan bacaan/buku pegangan bagi para guru untuk mengajarkan mata pelajaran akuntansi.

Untuk menjawab peluang dan tantangan di atas tentunya sekolah harus berpikir secara *out of the box* bukan *in the box* artinya sekolah tidak hanya berpikir jumlah peserta didik yang lulus (*output*) akan tetapi berapa banyak peserta didik yang lulus dan bekerja sesuai dengan kompetensinya (*outcome*). Untuk menciptakan itu, sekolah harus melihat kebutuhan pasar (dunia industri) apalagi pemerintah yang saat ini menggelontorkan dana desa yang cukup besar yang tidak diimbangi dengan penyiapan SDM di desa yang terampil untuk mengelolanya dan lebih banyak melalui jalan pintas dengan penyediaan tenaga pendamping.

Peningkatan pemahaman guru mata pelajaran akuntansi khususnya akuntansi dana desa tentunya diperlukan pelatihan yang cukup melalui instruktur/pengajar yang kompeten selain itu perlu fleksibilitas guru di dalam mengimplementasikan silabi mata

pelajaran akuntansi dan menambah literatur/bahan bacaan/buku pegangan terutama praktik akuntansi dana desa.

Bagi desa dengan adanya lulusan SMK khususnya program akuntansi yang mau mengabdikan di desanya ini merupakan harapan desa bagi generasi muda yang peduli untuk membangun dan memajukan desanya.

Dari permasalahan di atas terutama penyediaan SDM yang terampil melalui pendidikan SMK khususnya program akuntansi, ada beberapa saran baik bagi sekolah, pemerintah maupun akademisi. Sekolah perlu segera melakukan pelatihan bagi guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi dan menyempurnakan silabus disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri (pengelolaan dana desa) serta menambah buku pegangan bagi guru yang mengajar mata pelajaran akuntansi serta mempertimbangkan penyampaian mata pelajaran akuntansi sebaiknya sebelum peserta didik melakukan PKL (misal: dikelas 10).

Pemerintah khususnya Kemendes PDDT yang berwenang dalam program dana desa perlu mengkaji kembali keberadaan tenaga pendamping desa yang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun dan perlu diganti oleh tenaga lulusan SMK program akuntansi yang terampil. Untuk itu diperlukan koordinasi bagi perumus kebijakan di pusat, yaitu Kemendes PDDT, Kementenaga kerja, dan Kemendikbud. Untuk akademisi, penelitian ini merupakan embrio untuk dilakukan penelitian yang cakupannya lebih luas (tingkat nasional) yang nanti hasilnya dapat dijadikan sebagai pijakan bagi perumus kebijakan di pusat.

#### REFERENSI

- Arend, Richard I. (1997). *Classroom Instruction & Management*. New York: Mc.Graw Hill
- Arend, Richard I. (2004). *Learning to Teach*. New York: Mc. Graw Hill.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan pusat statistik (2018) *Februari 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,13 persen, Rata-rata upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html> (Accessed: 26 November 2019).
- Fitritamami, A. A. et al. (2018) 'Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Mahasiswa', pp. 1105–1127.
- Gatra, S. (2019) *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*, [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com). Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun> (Accessed: 26 November 2019).
- Julianto, P. A. (2017) *Kemendes PDDT Akui Masih Kekurangan Pendamping Desa*, [www.ekonomi.kompas.com](http://ekonomi.kompas.com). Available at: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/28/163700026/kemendes-pdtt-akui-masih-kekurangan-pendamping-desa-> (Accessed: 20 October 2019).
- Margunani and Nila, A. (2012) 'Pengaruh Praktik Kerja Industri Dan Penguasaan Mata Diklat Terhadap Kesiapan Kerja Siswa Smk Di Kabupaten Kendal', *Dinamika Pendidikan*, 7(1), pp. 1–7. doi: 10.15294/dp.v7i1.4911.
- Novelino, A. (2019) *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat*, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat#> (Accessed: 26 November 2019).
- Premono, A. (2010) 'Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan: Antara Kebijakan dan Realita', *Jurnal Pendidikan Penabur*, 9(15), pp. 50–61. Available at: <http://www.bpkpenabur.or.id/id/jurnal>.
- Putra, C. K. and Pratiwi, R. N. S. (2013) 'PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)', 1(6), pp. 1203–1212.
- Sembiring, L. J. and Asmara, C. G. (2019) *Tahun 2020, alokasi anggaran pendidikan naik mencapai Rp 506 triliun*, [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190816143808-4-92549/jokowi-siapkan-anggaran-pendidikan-rp-5058-t-di-2020> (Accessed: 26 November 2019).
- Shuha, K. (2018) 'ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman )', *Universitas Negeri Padang*, pp. 1–21.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M. and Salim, M. G. (2017) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang', *Jurnal Riset Manajemen*, (November 2016), pp. 124–135. Available at: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/issue/view/85>.
- Valid, Y. M. and Taman, A. (2012) 'Pengaruh Pengalaman Praktik Industri dan Prestasi Belajar terhadap Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK YPKK 2 Sleman Yogyakarta', *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, pp. 161–183.
- Wibowo, N. (2016) 'Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Tuntutan Dunia Industri', *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1), p. 45. doi: 10.21831/jptk.v23i1.9354.

